

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE*
(Studi Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Fauzul Kabir

NIM: C93215105



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fauzul Kabir

NIM : C93215105

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana *Obstruction of Justice* (Studi Pasal 21
Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang
Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fauzul Kabir

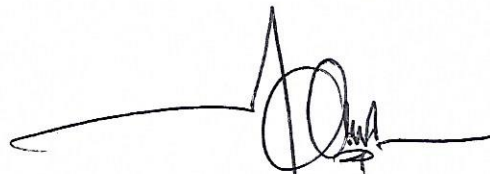
NIM. C93215105

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fauzul Kabir NIM. C93215105 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Juli 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line on the left, a large loop in the middle, and a smaller loop on the right, all connected by a thin line.

H. Mahir Amin, M.Fil.I


NIP. 197212042007011027

PENGESAHAN

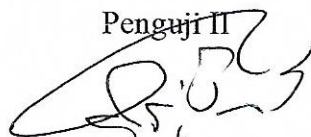
Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fauzul Kabir NIM. C93215105 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, dan dapat diterima salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

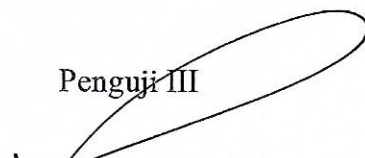
Penguji I


H. Mahir Amin, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

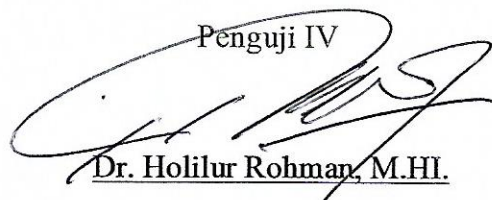
Penguji II


Drs. H. Suis, M. Fil. I
NIP. 196201011997031002

Penguji III


Moh. Hatta, S.Ag, M.HI.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV


Dr. Holilur Rohman, M.HI.
NIP. 198710022015031005

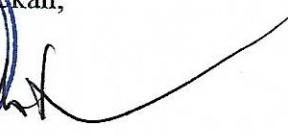
Surabaya, 30 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel




Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fauzul Kabir
NIM : C93215105
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : fauzulkabirr@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* (STUDI PASAL 21 UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)

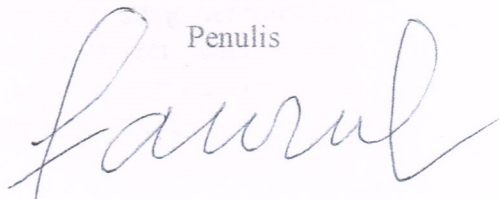
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2019

Penulis


(Muhammad Fauzul Kabir)

Sejauh penelusuran Penulis, penelitian tentang tindak pidana *obstruction of justice* masih sangat jarang dibahas. Terlebih yang fokus penelitiannya berkaitan dengan aspek hukum pidana Islam belum Penulis temukan. Namun Penulis menemukan sebuah penelitian serupa dengan penelitian yang akan dilakukan Penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun Allivia Putri Gandini, 2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Kebijakan Kriminalisasi *Obstruction of Justice* sebagai Delik Korupsi dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembahasan skripsi ini adalah mengenai latar belakang adanya kebijakan kriminalisasi *obstruction of justice* sebagai delik korupsi dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 dan juga tentang praktek penegakan hukum terhadap delik *obstruction of justice*. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan latar belakang diaturnya tindak pidana *obstruction of justice* dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999, dikarenakan pengaturan tindak pidana serupa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sebagai pasal yang tidur. Hal ini dikarenakan tidak pernah terdengar diterapkan oleh para penegak hukum, yang dikarenakan oleh perumusan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 yang dalam praktiknya, sering diartikan sebagai delik materil dan juga untuk mempermudah proses peradilan dan

menghindarkan dari segala bentuk hambatan yang dapat menghambat tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut, sehingga terciptanya proses peradilan yang berkeadilan.¹⁰

Kedua, skripsi yang disusun oleh Sutanto Nugroho, 2018, Jurusan hukum Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang berjudul “Pengaturan Tindak Pidana *Contempt of Court* Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia”. Pembahasan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana perkembangan masalah fenomena sosial yang secara yuridis perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum dan nilai yang hidup dalam masyarakat, salah satunya dinamakan *contempt of court*. Yaitu setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang merendahkan, menghina dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Hukum pidana positif Indonesia belum mampu menyentuh segala bentuk tindak pidana *contempt of court* dan belum mempresentasikan pengertian dan ruang lingkup *contempt of court* secara lengkap dan integral, serta pengaturan yang belum diatur secara mandiri dan masih tersebar dalam peraturan perundangan pidana. Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu bentuk perbuatan *contempt of court* yang dilakukan secara langsung di dalam pengadilan. Perbuatan *contempt of court* tersebut bersifat kontradiktif dengan tujuan peradilan yang

¹⁰ Allivia Putri Gandini, “Kebijakan Kriminalisasi *Obstruction of Justice* sebagai Delik Korupsi dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 29.

Bab pertama menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang berisi data yang dikumpulkan, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang kerangka teoritis atau kerangka konseptual yang berisi tentang tinjauan umum terhadap jarimah takzir, yang memuat tentang pengertian jarimah takzir, macam-macam jarimah takzir dan sanksi hukum jarimah takzir.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang *obstruction of justice*. Dalam bab ini Penulis akan menerangkan tentang definisi *obstruction of justice*, contoh kasus *obstruction of justice* di Indonesia dan sanksi hukum dalam perundang-undangan di Indonesia terhadap tindak pidana *obstruction of justice*.

Bab keempat adalah analisis hukum pidana Islam dalam tindak pidana *obstruction of justice* menurut Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab kelima Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup, meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian ini serta yang terakhir adalah daftar pustaka.

- a) Imam Malik bin Anas mendefinisikan pengasingan sebagai hukuman dengan tujuan menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri non Islam.
- b) Imam Syafi'i mengatakan jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qashar. Sebab, apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggal.
- c) Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik sepakat bahwa pengasingan artinya dipenjarakan.

Perihal durasi masa pengasingan, para ahli hukum Islam memiliki pandangan yang beragam. Sebagaimana berikut:

- a) Di kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa masa pengasingan maksimal satu tahun, supaya tidak melebihi masa pengasingan dari jarimah zina yang merupakan hukuman *had*. Apabila pengasingan dalam takzir lebih dari satu tahun.
- b) Di kalangan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa masa pengasingan boleh lebih dari satu tahun, karena sanksi pengasingan bukan merupakan hukuman *had*.
- c) Di kalangan Imam Malik berpendapat senada dengan Imam Abu Hanifa. Namun, mereka tidak membatasi durasi hukuman dan sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan penguasa.

untuk menyembunyikan kejahatan itu dan sebagainya. (Pelanggar harus mempunyai maksud ini, jika tidak, tidak dapat dihukum).

Selain diatur di dalam KUHP, tindakan *obstruction of justice* juga diatur dalam hukum pidana khusus. Bahkan lebih spesifik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, substansi *obstruction of justice* ini diatur dalam pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 berkaitan dengan menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 22 berkaitan dengan memberikan keterangan tidak benar di proses penyidikan dan pemeriksaan pengadilan, dan Pasal 23 berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429 dan pasal 430 KUHP.

Secara khusus ketentuan *obstruction of justice* diatur dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 menegaskan:

setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

mengetahui suatu tindak pidana dibolehkan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan. Dengan demikian, *obstruction of justice* adalah suatu pembangkangan terhadap fungsi instrumentasi asas legalitas karena dianggap mencegah, merintangi, atau menggagalkan pelaksanaan kekuasaan negara, dalam hal ini aparat penegak hukum yang sedang melakukan proses penegakan hukum dalam suatu perkara pidana.

Secara formil perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum dirumuskan dalam Pasal 221 KUHP sebagai undang-undang umum, dan secara khusus dalam perkara korupsi dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 diadopsi dari Pasal 221 KUHP, yang mana terjadi pergeseran sifat dari delik materil menjadi delik formil. Perumusan Pasal 221 KUHP menitikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki yaitu menghalang-halangi proses hukum. Sedangkan Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang yaitu mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Awal mula kriminalisasi *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi, muncul sejak berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 1971

Artinya, delik *obstruction of justice* adalah delik yang berdiri sendiri, atau dalam ilmu hukum pidana Jerman dikenal dengan istilah *nachtaterschaft* atau *begünstigung* (bentuk-bentuk pemudahan).

Dalam konteks hukum Islam, *obstruction of justice* dikualifikasikan sebagai jarimah karena *obstruction of justice* mengandung kemudharatan terhadap penegakan hukum, sehingga haram untuk dilakukan, karena bertentangan dengan kebenaran atau keadilan. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, kemudharatan tersebut berupa kurangnya kemandirian kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*), kurangnya rasa keadilan bagi para pihak yang diproses secara lambat (*justice delayed justice denied*), dan hilangnya hak untuk diperiksa secara cepat (*speedy administration of justice*).

Tindak pidana *obstruction of justice* dapat dikatakan jarimah jika telah memenuhi unsur-unsurnya, baik unsur jarimah yang bersifat umum maupun khusus. Adapun unsur dalam perbuatan *obstruction of justice* adalah:

1. Pelaku *obstruction of justice* adalah orang yang berakal dan sudah baligh, dalam hal ini setiap orang bermakna siapapun itu, dengan profesi apapun. Bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu.
2. Pelaku *obstruction of justice* melakukan jarimah yang menyebabkan terhalangi atau terintanginya kebenaran. Dengan cara sengaja, mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Pelaku tindak pidana dalam hal ini berniat untuk efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses yudisial.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman *Obstruction of Justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam ruang lingkup hukum pidana Islam, *obstruction of justice* termasuk pelanggaran terhadap hak Allah berkaitan dengan hak menjalankan hukum Allah, oleh sebab itu *obstruction of justice* wajib diberi hukuman yang sesuai, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, kriminalitas terkait perbuatan mencegah, merintang, menggagalkan penegakan hukum belum ditentukan syarak. Meskipun hukuman *obstruction of justice* tidak ditetapkan dalam Alquran maupun hadis, tetapi jarimah ini tetap tidak akan lepas dari hukuman. *Obstruction of justice* masih dapat dikenakan hukuman takzir dengan alasan untuk kemaslahatan penegakan hukum. Terhadap kewenangan untuk menetapkan suatu hukuman takzir atas *obstruction of justice* sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*.

Untuk menentukan sanksi hukum dari tindak pidana *obstruction of justice*, dapat dilakukan dengan metode ijtihad *qiyas*, yang menjadi *al-aslu* adalah setiap orang yang menghalangi dilaksanakannya hukum Allah, maka sama dengan menentang perintah Allah. Sedangkan yang menjadi hukum *'azl* adalah larangan untuk melakukan tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan, diantaranya dengan cara tidak melaksanakan, merintang, maupun menggagalkan suatu ketentuan hukum yang ada. Hal itu karena apabila

melakukan tindakan atau upaya-upaya untuk menghalangi jalannya peradilan, maka dapat membuat proses penegakan hukum menjadi terhambat.

Dengan dasar tersebut, maka Penulis berpendapat bahwa sanksi tindak pidana *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah sesuai dengan hukum pidana Islam, karena kejahatan *obstruction of justice* telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam jarimah takzir, serta pihak yang berwenang menetapkan hukuman takzir adalah *ulil amri*. Adapun hukuman yang pantas untuk *obstruction of justice* adalah sanksi takzir atas kemerdekaan seseorang dalam bentuk hukuman penjara terbatas dengan batas paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, serta sanksi takzir atas harta seseorang dengan hukuman denda minimal denda 150 juta dan maksimal denda 600 juta yang ditetapkan melalui ijtihad hakim.

